

SOSIOLOGI MASYARAKAT BALI: BALI DULU DAN SEKARANG

Gede Kamajaya¹, Wahyu Budi Nugroho²

^{1,2}Pendidikan Sosiologi, Universitas Udayana Bali

Email: kamajaya_1965@yahoo.com

Abstrak

Selama beberapa dekade pasca diperkenalkannya Bali sebagai surga terakhir bagi para pelancong, yang didukung oleh kebijakan pembangunan era orde baru yang berimbas pada tata kelola pembangunan Bali. Berbagai masalah lingkungan akhir-akhir ini menjadi ancaman serius, alih fungsi lahan produktif menjadi lahan hunian terjadi sangat masif terutama di daerah-daerah konsentrasi pariwisata. Perubahan sosial masyarakat Bali tidak saja berlangsung cepat tetapi juga berdimensi amat luas menyangkut berbagai bidang kehidupan yang terkait satu sama lain. Penelitian ini menggunakan studi metode studi pustaka untuk pengumpulan data dengan mengadakan studi telaah terhadap buku-buku, literatur, catatan dan lapiran yang berkaitan dengan masalah yang hendak dipecahkan. Perubahan Bali dari agraris menjadi industri pariwisata sedikit tidaknya berdampak pada berubahnya karakter masyarakat Bali. Perubahan sosial masyarakat Bali tidak saja berlangsung cepat tetapi juga berdimensi amat luas menyangkut berbagai bidang kehidupan yang terkait satu sama lain.

Kata kunci: perubahan sosial; masyarakat Bali;

Abstract

For several decades after the introduction of Bali as the last paradise for travelers, which was supported by the development policies of the New Order era that impacted Bali's development governance. Various environmental problems have recently become a serious threat, the conversion of productive land to residential land has been very massive, especially in areas where tourism is concentrated. The social change of Balinese society is not only fast but also has very broad dimensions regarding various fields of life which are related to one another. This study uses literature study methods for data collection by conducting study studies of books, literature, notes and reports related to the problem to be solved. The change in Bali from agrarian to the tourism industry has at least had an impact on the changing character of Balinese society. The social change of Balinese society is not only fast but also has very broad dimensions regarding various fields of life which are related to one another.

Keywords: social change; Balinese society;

PENDAHULUAN

Derasnya informasi tentang “keanehan” Bali makin menjadi ketika perusahaan pelayaran Belanda KPM (*Koninklijk Paketvaart Maatschappij*) tahun 1920 mempopulerkan Bali sebagai daerah tujuan wisata bagi pejabat tinggi Belanda. Bali kemudian di kenal dengan sebutan “Mutiara Kepulauan Nusa Tenggara” (*Picturesque Dutch East Indies*). Pada akhirnya, citra Bali yang demikian ideal bagi para pelancong tersebar seantero dunia. Kondisi inilah yang

menjadikan Bali begitu masyur di mata dunia. H.van Kol seorang parlemen Belanda adalah wisatawan yang dianggap pertama kali menginjakkan kakinya di Bali pada tahun 1902.

Sejatinya keontentikan Bali dicitrakan oleh pemerintah colonial lewat satu program antropologis yang dikenal dengan Baliseering. Baliseering adalah usaha-usaha kajian ilmiah tentang Bali dengan pendekatan etnografi. Sejalan dengan penjelasan tersebut di atas, Covarubias menjelaskan bagaimana citra otentik Bali dijual untuk kepentingan pariwisata salah satunya lewat citra kecantikan perempuan Bali yang polos dan bertelanjang dada telah diperas habis-habisan dalam ceramh tentang perjalanan dan oleh agen wisata tetapi jauh di tahun 1619 dapat ditelusuri catatan bahwa perempuan Bali sangat diperlukan dalam pasar budak (Covarubias, 2013:13,Suryawan, 2010).

Selama beberapa dekade pasca diperkenalkannya Bali sebagai surga terakhir bagi para pelancong akomodasi sebagai penunjang kebutuhan para pelancong mulai tumbuh dan berkembang tidak terkendali. Hal ini didukung oleh kebijakan pembangunan era orde baru yang mengutamakan pembangunan ekonomi, strategi pembangunan ala orde baru ini berimbas pada tata kelola pembangunan Bali. Hal ini nampak dalam wujud *mass tourism* dan eksploitasi besar-besaran dalam waktu yang relatif cepat menimbulkan kegelisana baru (Atmadja, 2010:ix). Berbagai masalah lingkungan akhir-akhir ini menjadi ancaman serius, alih fungsi lahan produktif menjadi lahan hunian terjadi sangat masif terutama di daerah-daerah konsentrasi pariwisata. Pendek kata alih fungsi lahan akibat masifnya pembangunan akomodasi pariwisata dan lahan hunian menghimpit petani hingga ke jurang paking dalam.

Perubahan Bali dari agraris menjadi industri pariwisata sedikit tidaknya berdampak pada berubahnya karakter masyarakat Bali. Perubahan sosial masyarakat Bali tidak saja berlangsung cepat tetapi juga berdimensi amat luas menyangkut berbagai bidang kehidupan yang terkait satu sama lain. Di satu sisi perubahan berdampak bagi kemajuan masyarakat Bali namun disisi lain tidak jarang perubahan yang terjadi justru membawa konsekuensi negatif (Atmadja, 2010:1). Sebagai misal dalam beberapa kasus seringkali kita jumpai baik dalam

media cetak maupun elektronik terjadi kasus-kasus privatisasi lahan oleh pemilik modal sehingga masyarakat Bali tidak mendapatkan akses meski sekedar untuk melewati kawasan hotel. Contoh lain dapat kita lihat dalam keseharian masyarakat Bali, jika karakteristik masyarakat agraris adalah guyub sebagaimana penjelasan Durckheim (Haryanto, Nugrohadi,2011,Soekanto 2010) dewasa ini karakteristik ini mulai bergeser seiring dengan berubahnya mata pencaharian masyarakat Bali. Masyarakat Bali yang menggantungkan hidupnya dibalik gemerlap pariwisata dituntut oleh profesinya untuk mengedepankan profesionalisme, efisien dan praktis kemudian menuntun secara perlahan masyarakat Bali menjadi pragmatis. Perlahan namun pasti suasana guyub meredup ditelan perubahan.

Dengan kondisi seperti diuraikan diatas maka menarik dibahas lebih lanjut bagaimana wajah Bali dulu hingga sekarang. Berbagai pertanyaan tentang bagaimana Bali berubah, pada sisi mana perubahann tersebut terjadi berikut dampak yang ditimbulkan, siapa atau apa yang menjadi pemicu perubahan sosial budaya tersebut akan menjadi pijakan awal dari uraian berikutnya.

METODE

Untuk menelusuri bagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat Bali, maka metode yang dianggap paling tepat adalah studi pustaka. Studi pustaka atau studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi telaah terhadap buku-buku, literature, catatan dan lapiran yang berkaitan dengan masalah yang hendak dipecahkan (Nazir,1988:111). Tujuan utama studi pustaka adalah mengumpulkan temuan-temuan yang pernah dilakukan sebelumnya tentang satu obyek penelitian. Ada beberapa jenis sumber bacaan yang dapat dijadikan rujukan dalam studi pustaka diantaranya, buku teks, jurnal, periodicial, bulletin, manual review, handbook hingga skripsi, tesis dan desertasi (Nazir,2005:106). Ada beberapa manfaat dari studi pustaka sebagai metode penelitian, studi pustaka dapat menghindarkan penulis dari plagiasi, sebagai tanggung jawab moral peneliti atau ilmuwan untuk menghargai penelitian sebelumnya berikut menemukan hal-hal yang sekiranya belum dijelaskan dalam penelitian sebelumnya (Prastowo,2012:85). Pada konteks penelitian ini, studi

pustaka akan dimulai dengan mengunpulkan sumber-sumber bacaan terkait dengan Bali. Selanjutnya, melalui buku-buku tersebut, peneliti akan melakukan studi pustaka, pembacaan, analisis berikut memberikan cara pandang baru atas obyek penelitian.

Kajian pustaka dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (a) penyajian sesuai dengan tahun penelitian; dan (b) penyajian disesuaikan relevansi, kedekatannya dengan objek (Prastowo 2012: 83).

Sesuai dengan Tahun Penelitian

Cara penyajian kajian pustaka dalam jenis ini disajikan secara kronologis dengan pertimbangan bahwa aspek kesejarahan memiliki makna tertentu dalam menentukan objektivitas penelitian seperti dilakukan dalam berbagai analisis persepsimasyarakat.

Sesuai dengan Relevansi dan Kedekatan dengan Objek

Cara kedua dilakukan dengan pertimbangan relevansi kedekatan penelitian dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Sebagai penelitian ilmiah cara kedua ini dianggap lebih baik dengan pertimbangan bahwa penelitian yang dilakukan memang baru berbeda dengan penelitian lain.

Penyusunan kajian pustaka meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

1. Membaca karya-karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang terkait
2. Mencatat hasil intrepretasi terhadap bahan-bahan bacaan
3. Menyusun kajian pustaka berdasarkan hasil analisis terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan.

Dalam konteks penelitian ini, akan dipilih model studi pustaka jenis kedua yaitu studi pustaka yang sesuai dengan relevansi dan kedekatan objek. Hal ini dilakukan mengingat penelitian ini tidak akan menitikberatkan analisis pada sisi kesejarahan namun lebih kepada upaya untuk membaca smber-sumber yang relevan, kemudian memberi interpretasi berikut mencoba meberi sudut pandang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modernisasi Masyarakat Bali

Catatan modernisasi di Pulau Dewata dapat dikatakan “tipikal” dengan sejarah modernisasi di nusantara, hanya saja tetap masih bisa dilihat perbedaannya, dan pada satu titik bertemu pada simpang yang sama. Menurut Hildred Geertz (1988), masyarakat Pulau Bali telah lama bersentuhan dengan kebudayaan asing yang bersifat internasional, yakni pertemuan mereka dengan budaya (masyarakat) Jawa, Cina, dan India jauh sebelum berhadapan dengan kolonialisme dan imperialisme. Bentuk pertemuan sekaligus akulturasi budaya ini dapat dilihat lewat peninggalan benda-benda di berbagai desa Bali yang telah menggunakan bahan metal seperti besi, tembaga, perak, emas, dan lain-lain. Bahkan menurut Geertz, meskipun masyarakat pedesaan Bali dahulu hidup terpencil, namun mereka telah bersifat internasional—*global village* ‘desa global’.

Bali memperoleh momentum modernisasi secara masif di era *Oil Boom* Orde Baru. Penempatan Bali sebagai destinasi pariwisata nasional, dan terutama internasional oleh pemerintahan Orde Baru berimplikasi langsung pada pembangunan berbagai sarana dan prasarana pariwisata bertaraf internasional. Para investor asing memang telah mulai menanamkan modal di era Pemulihan Ekonomi (1966-1974), namun modal asing yang masuk ke Bali semakin deras pada era *Oil Boom* dikarenakan pemerintah pusat turut membangun infrastruktur pariwisata seperti jalan, jembatan, dan lain-lain.

Pada masa-masa ini, hotel-hotel internasional mulai bermunculan di Bali, begitu pula dengan berbagai standarisasi internasional yang menyertainya. Faktual, pembangunan yang terjadi pun tak hanya bersifat fisik, tetapi juga nonfisik, seperti diterapkannya (baca: diajarkannya) manajemen dan pengelolaan usaha modern, penggunaan bahasa Inggris, *table manner*, dan lain sebagainya. Berbagai perubahan tersebut sedikit-banyak tentu berpengaruh terhadap mentalitas masyarakat Bali, bahkan dari hal yang sepele sekalipun, seperti diperkenalkannya perkakas dapur modern, tempat kakus modern, instrumen-instrumen musik modern, dan lain sebagainya.

Lebih jauh, dampak paling besar dan paling terasa dari modernisasi masyarakat Bali adalah berubahnya mata pencaharian utama masyarakat Bali dari sektor pertanian menjadi pariwisata. Secara langsung maupun tak langsung, hal ini turut berimplikasi pada sistem sosial masyarakat Bali. Secara sederhana, “sistem sosial” bisa didefinisikan sebagai jalinan unsur-unsur sosial yang saling berhubungan satu sama lain, dan membentuk satu kesatuan. Dengan demikian, apabila satu unsur sosial mengalami perubahan, maka hal ini akan berdampak pada unsur-unsur sosial lainnya.

Sejalan dengan proses modernisasi kehidupan sehari-hari dan pembagian kerja di dalamnya. Faktual, mentalitas manusia modern “yang terukur” pun sedikit-banyak mulai mempengaruhi masyarakat Bali. Mentalitas yang dimaksud, apabila boleh dikatakan secara vulgar yakni “dolarisasi” atau monetisasi kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, terdapat kecenderungan masyarakat Bali yang terlampau “menjual segalanya” demi pariwisata—akan dibahas lebih jauh nanti. Tak hanya itu saja, monetisasi kehidupan sehari-hari ini juga tampak dalam berbagai aktivitas sosial, bahkan ritual keseharian masyarakat Bali.

Ngayah yang Tergantikan Uang

Secara etimologis, istilah *ngayah* diadopsi dari konteks kultural dan politik zaman feodal (kerajaan) di Bali, dan berasal dari kata *ayah*, *ayahan*, *pengayah*, atau *ngayahang*. Istilah tersebut juga berarti keterkaitan antara ayah dengan anak, atau sesuatu yang mewaris secara turun-temurun. Dalam konteks sosial masyarakat Bali, *ngayah* adalah kewajiban sosial dari penerapan *Karma Marga* yang dilakukan secara gotong-royong, dan dengan hati yang tulus ikhlas baik di banjar maupun di tempat suci. Secara eksplisit, kata *ngayah* bisa diterjemahkan sebagai “melakukan pekerjaan tanpa mendapatkan upah”. Terdapat tiga bentuk *ngayah*, antara lain; kewajiban berupa dedikasi dan loyalitas terhadap raja-raja (pada masa lalu) (*pengayah puri*)—karena dahulu tanah atau lahan diberikan oleh raja-raja, kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan sosial-kultural banjar adat

(*pengayah banjar*), serta kewajiban religius-teritorial terkait Pura Kahyangan (*pengayah pura*) (Input Bali, 2015).

Pada keseharian masyarakat Bali yang telah terintegrasi dalam kehidupan modern, *ngayah* boleh jadi terhambat oleh rutinitas mereka, atau bisa juga dikatakan: rutinitas keseharian mereka “terganggu” oleh *ngayah*. Hal ini sebagaimana disinggung sebelumnya terkait waktu kerja dalam kehidupan modern yang telah terjadwalkan sedemikian rupa. Terlebih, bagi mereka yang merantau dari pedesaan ke kota-kota Bali, dan jarak tempuh ke kampung halamannya terbilang jauh. Bagi para perantau ini, kewajiban *ngayah* tentu menjadi problem tersendiri.

Tak jarang dari mereka menyiasati kewajiban ini dengan cara menggantinya lewat sejumlah uang. Hal ini menunjukkan secara jelas terjadinya “monetisasi kehidupan sosial”, yakni bagaimana uang seolah bisa menggantikan kewajiban sosial, dan begitu pula: bagaimana uang seakan bisa “mengukur” kewajiban sosial. Di sini, secara sosial, uang seolah menjadi “cara berkomunikasi”, yakni representasi atas dominasi yang bisa ditetapkan lewat ukuran-ukuran material. Sementara, aktivitas *ngayah* dan uang sesungguhnya merupakan dua hal yang tak berhubungan. Apabila *ngayah* diterjemahkan sebagai kerja sukarela yang tak berbayar, maka pembayaran pun harusnya tak bisa dibenarkan untuk mengganti kerja sukarela tersebut.

Ngayah sebagai kewajiban sosial adalah suatu aktivitas yang tak terukur. Nilai, norma, dan budaya sosial menubuh bersama *ngayah*, hal ini sekaligus menunjukkan bagaimana individu yang melakukan *ngayah* (*pengayah*) sebetulnya juga sedang mentransformasikan aktivitas fisik-materialnya pada nilai, norma, dan budaya yang bersifat imaterial. Dalam aktivitas fisik-material tersebut terdapat kehadiran (*existence*), gestur, interaksi, tatapan mata, ekspresi, serta laku fisik yang dilokuskan pada suatu obyek *ngayah*. Namun, aktivitas fisik-material ini pun sesungguhnya turut dijiwai perihal imaterial, yakni nilai, norma, dan budaya yang telah menubuh. Dengan demikian, uang yang tak memiliki kehadiran individu, gestur, ekspresi, serta laku aktivitas *ngayah* sama sekali tak tepat atau bahkan tak bisa ditukarkan dengan aktivitas *ngayah*.

Implikasi ketiadaan individu dalam *ngayah*—yang menggantinya dengan uang—adalah hilangnya “cerita”, juga tak lengkapnya “memori” masyarakat dikarenakan ketiadaan kehadiran. Sementara, cerita atau narasi sosial adalah salah satu tema sentral tentang bagaimana suatu masyarakat bisa terbentuk. Ketidakhadiran salah satu cerita (seorang *pengayah*) membuat narasi sosial yang tercipta dalam sebuah peristiwa sosial menjadi tidak utuh. Terdapat satu atau lebih pihak yang tak bisa menyumbangkan narasinya pada masyarakat, hal ini pada gilirannya sekadar menempatkan dirinya sebagai *is* atau “adalah”, yakni sebagai obyek yang justru akan dinarasikan secara sepihak oleh masyarakat akibat ketidakhadirannya.

Dalam hal ini dapat dilihat, nilai, norma, dan budaya yang telah menubuh sesungguhnya memberikan kesempatan bagi individu untuk menjadi subyek dalam masyarakat. Dengan turut hadir di tengah masyarakat sebagai seorang *pengayah*, ia bisa menyumbangkan sebuah narasi untuk dihubungkan dengan narasi-narasi lain berbagai individu yang ada di situ. Sekali lagi, uang takkan pernah bisa menggantikan pentingnya narasi ini, karena seyogyanya narasi sosial selalu bersifat spontan dan emosional.

Lebih jauh, ketidaklengkapan memori masyarakat juga bisa berimplikasi pada solidaritas masyarakat itu sendiri. Dalam satu atau dua kali momen, hal ini masih bisa “dimaafkan”, namun apabila ketidakhadiran ini selalu berulang dan digantikan dengan uang, maka nilai, norma, dan budaya sosial pun seolah menjadi inferior dibandingkan uang. Dalam hal ini, ketidakhadiran di dalam *ngayah* juga menyiratkan *value* ‘nilai’ lain yang lebih dijunjung ketimbang nilai sosial. Apabila demikian, maka “masyarakat asli” tempat individu itu berasal menjadi sebuah komunitas terbayang, sedangkan masyarakat sekunder tempatnya bekerja dalam iklim modern justru berubah menjadi masyarakat nyata bagi dirinya. Timbulnya masyarakat terbayang ditambah memori yang tak lengkap tentu berdampak pada masa depan suatu masyarakat yang rapuh. Pemeliharaan ingatan yang tak lengkap ini pada awalnya mungkin masih bisa diselamatkan, tetapi lambat-laun dikarenakan generasi juga terus berganti, ingatan atau memori tersebut pun dapat lenyap.

Melalui poin di atas, dapat disimpulkan secara sementara bahwa narasi sosial individu maupun pemeliharaan memori yang lengkap turut memiliki sumbangsih bagi kelanggengan gayah itu sendiri. Di ranah berlainan, yakni dalam perspektif sosiologis, gayah adalah sebetuk tindakan voluntaris atau “sukarela”. Dalam hal ini, segala bentuk tindakan voluntaris adalah aktivitas yang paling mampu mempresentasikan motivasi termurni manusia. Apa yang dimaksudkan adalah, tindakan manusia yang tak didorong oleh motivasi-motivasi bersifat material, melainkan imaterial. Dalam pandangan sosiologi Max Weber (Weber, 2008, Ritzer, 2015), tindakan ini disebut sebagai “rasionalitas nilai”, yakni suatu perilaku yang didasarkan pada ihwal yang dianggap baik, benar, dan diharapkan keterwujudannya. Dalam rasionalitas nilai, tidak ditemui ukuran-ukuran tentang kerugian atau keuntungan (rasionalitas formal), pun orientasi dari tindakan ini yang tak mengarah pada hasil (rasionalitas instrumental), melainkan proses. Oleh karenanya, turut berpartisipasi dalam gayah sebetulnya tidak hanya sedang berkorban demi orang lain atau masyarakat, tetapi di situ individu juga sedang menyelamatkan dirinya sebagai “manusia”.

Banjar: Ruang Publik yang Kian Redup

Sebagai satu kesatuan hukum yang berhak mengadakan pemerintahan sendiri, desa di Bali memiliki keunikan tersendiri. Ini bisa dilihat dari terjadinya dualisme desa di Bali. namun tetap bisa berjalan beriringan_ *desa pakraman* dan *desa dinas*. Secara sederhana *Desa Pakraman* sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dapat dipahami bahwa Desa Pakraman berfungsi sebagai benteng pemertahanan dan pengembangan adat dan agama (Atmadja, 2010: 47), sedangkan *Desa Dinas* jika mengacu pada UU no 5 tahun 1979 adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah camat yang berhak mengatur rumahtangganya sendiri (Wisadirana, 2004: 19). Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Carol A. Waren (1990) yang memberikan definisi lebih sederhana bahwa *Desa Pakraman* dan *desa dinas* adalah lembaga kemasyarakatan yang

memilikinya fungsinya masing-masing dengan pendekatan sosial antropologis (Parimarta, 2004: 14).

Secara organisatoris dibawah sistem pemerintahan desa baik desa dinas maupun desa *Pakraman/desa adat* di Bali terdapat satu unit sosial lebih kecil yang biasa kita kenal dengan dengan sebutan *Banjar*. Sesuai dengan fungsinya *Banjar* pun terbagi menjadi dua yaitu *banjar* dinas dan *banjar pakraman/banjar adat*. *Banjar* dinas merupakan perpanjangan pemerintah pada tingkat terendah untuk urusan administrasi mulai dari membuat KTP, KK dan sejenisnya. *Banjar* dinas dipimpin oleh seorang *kelian* dinas yang mempunyai tugas sebagai pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Secara struktural *banjar* dinas berada dibawah desa dinas Sedangkan *banjar pakraman* atau *Banjar adat* dipimpin oleh *kelian banjar adat* yang mengurus kegiatan sosial kemasyarakatan, agama terutama segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan adat berikut pemertahanannya. *Kelian adat* biasanya berstatus *ngayah* (tanpa gaji bulanan namun mendapatkan *reward* secara adat berupa pembebasan dari segala bentuk iuran adat). Seorang *kelian adat* dibantu oleh beberapa '*prajuru*' banjar diantaranya; *Petajuh* (wakil), *Petengen* (Bendahara), *Penyarikan* (sekretaris), *Kelian Sekaha* (ketua kelompok tarian, gamelan, dan sebagainya) dan *Kesinoman* (menyampaikan pesan ke anggota yang dalam basa Bali juga disebut "*juru arah*"). Hal inilah yang membedakan *banjar* atau dusun di Bali dengan dusun di daerah lain. *Banjar* di Bali memiliki tugas yang lebih komprehensif dengan melingkupi tugas adat dan serentetan kegiatan pemertahan adat lainnya dengan demikian peran *krama banjar* amat penting.

Merujuk pada fungsi *banjar* yang berbeda, sifat keanggotaan keduanya pun berbeda. Anggota banjar dinas adalah mereka yang secara administratif terdaftar secara dinas sebagai anggota masyarakat desa dinas suatu wilayah dengan berbagai hak dan kewajiban yang melekat padanya sedangkan keanggotaan *banjar* adat atau *pakraman* adalah mereka yang terdaftar sebagai warga desa adat sehingga memiliki hak secara adat dan secara otomatis juga merupakan warga dari

desa dinas. Singkatnya mereka yang terdaftar sebagai anggota *banjar* dinas belum tentu adalah warga *banjar* adat. Sifat keanggotaan *banjar* adat lebih tertutup dibandingkan sifat keanggotaan *banjar* dinas.

Istilah *banjar* sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Bali kuno. Salah satu prasasti berangka tahun 836 caka atau 914 masehi menyebutkan bahwa “*ser tunggalan banjar diindrapura*” yang artinya pengawasan bersama tunggalan untuk lingkungan atau kelompok diIndrapura. prasasti ini dikeluarkan ketika raja Ugrasena memerintah. sebelum *banjar* terbentuk sebagai sebuah institusi sosial, masyarakat menjadikan pohon besar nan rindang sebagai tempat untuk berkumpul dan bercengkrama hal ini dapat ditelusuri melalui naskah-naskah Markandea *Purana*. Berkumpul kemudian bercerita lepas tentang berbagai isu dan masalah yang sedang terjadi diperbincangkan bebas dibawah pohon rindang. Hal ini dilakukan tatkala aktivitas diladang telah berakhir. Setiap orang yang baru datang dan bergabung dalam kumpulan tersebut membawa topik masing-masing sehingga berita tak pernah putus. Pohon besar nan rindang tak ubahnya sumber berita, pusat dimana semua isu-isu disampaikan dan dikomentari bebas oleh siapa saja. Pendek kata banjar adalah ruang publik yang sudah sejak era kerajaan Bali kuno.

Banjar sebagai sebuah organisasi sosial memiliki beberapa kelengkapan diantaranya: *Balebanjar*: *Balebanjar* adalah sebuah balai pertemuan tempat biasa dilaksanakannya kegiatan-kegiatan banjar mulai dari kegiatan keagamaan, adat, pendidikan, kesehatan, sosialisasi, hingga hajatan politik, *Balebanjar* juga merupakan pusat hiburan karena berbagai pentas kesenian berlangsung disana. *Dibalebanjar*lah biasanya *krama banjar* bercengkrama lepas tentang segala isu-isu terkini. Senada dengan itu Gerzt menjelaskan bahwa *banjar* adalah sebuah tempat dimana politisi lokal menjalankan perannya (Gerzt, 2000). Sebuah ruang publik tempat dimana *krama banjar* dapat mengembangkan wacana publik dan beraktivitas secara individu maupun kelompok sebagaimana definisi ruang publik paling sederhana. Di Indonesia sendiri konsep ruang publik baru populer pasca pemerintahan Soeharto (Hardiman, 2010: 2, Habermas, 1991)).

Persoalan mulai memudarnya peran banjar sebagai ruang publik di Bali bisa ditelusuri akar musababnya dari pembangunanisme yang melanda Bali. Beberapa program pembangunanisme ala Orde Baru membawa implikasi serius pada sendi-sendi kehidupan masyarakat Bali (Atmadja, 2010). Berbagai program masuk desa semisal listrik masuk desa yang kemudian diikuti dengan masuknya TV ke rumah-rumah pada era 1990-an menjadikan masyarakat Bali memiliki alternatif lain untuk menikmati hiburan dan menghabiskan waktu senggang mereka di depan TV. Jika sebelumnya waktu senggang dihabiskan dengan menjadikan *banjar* sebagai arena publik untuk bercengkrama, berkumpul dan membicarakan banyak hal, dengan masuknya TV ke rumah-rumah bahkan hari ini lebih masif dengan masuk di masing-masing kamar masyarakat Bali kian menjadikan masyarakat Bali lebih eksklusif. Pada akhirnya kondisi ini menjadikan *Banjar* hanya dilihat sebagai instrumen pelengkap komunitas di sebuah lingkungan yang hanya berfungsi pada momen-momen tertentu yang bersifat temporer menyangkut urusan adat dan sekali waktu menyangkut urusan politik untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah, bukan sebagai ruang bebas, cair dan arena untuk menghilangkan sekat antar warga. Kondisi inilah yang terjadi di Prancis menurut Habermas yang juga menggantikan kedai kopi sebagai ruang publik karena dominasi media, TV, dan surat kabar misalnya menjadikan orang tidak lagi perlu mendatangi kedai kopi untuk berkumpul dan beropini bebas tentang berbagai isu. Pada tahap inilah berlangsung transformasi ruang publik menurut Habermas atau dengan kata lain tela terjadi perubahan struktural ruang publik di zaman modern (Basrowi, Soeyono, 2004, Wibowo, 2010).

SIMPULAN

Selama beberapa dekade pasca diperkenalkannya Bali sebagai surga terakhir bagi para pelancong, akomodasi sebagai penunjang kebutuhan para pelancong mulai tumbuh dan berkembang tidak terkendali. Hal ini didukung oleh kebijakan pembangunan era orde baru yang mengutamakan pembangunan ekonomi, strategi pembangunan ala orde baru ini berimbas pada tata kelola pembangunan Bali. Tak ayal eksploitasi besar-besaran dalam waktu yang relatif

cepat menimbulkan kegelisana baru. Perubahan Bali dari agraris menjadi industri pariwisata sedikit tidaknya berdampak pada berubahnya karakter masyarakat Bali. Perubahan sosial masyarakat Bali tidak saja berlangsung cepat tetapi juga berdimensi amat luas menyangkut berbagai bidang kehidupan yang terkait satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Bawa Nengah. 2010. *Ajeg Bali Gerakan, Identitas, Kultur dan Globalisasi*. Yogyakarta. LKIS.
- Basrowi & Soeyono, 2004. *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Surabaya: V d Press.
- Covarubias, Miguel. 2013. *Pulau Bali Temuan yang Menakjubkan*. Denpasar. Udayana University Press.
- Geertz, Clifford, 2000. *Negara Teater*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Hardiman, Budi, 2010. *Komersialisasi ruang publik menurut Hannah Arendt*, Yogyakarta: Kanisius.
- Haryanto, Nugrohadi. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Jurgen Habermas. 1991. *The Struktural Of The Public Shpere: an inquiry into a category of Bourgeois Society*, Canbridge: MIT Press.
- Kamajaya, Gede. 2015. <http://www.kabarbangsa.com/2015/06/pergulatan-identitas-manusia-bali.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2018.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____.1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ritzer, George. 2015. *Macdonalisasi Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suryawan, Ngurah. 2010. *Bali Antah Berantah*. Malang. In-Trans Publishing.
- Soerjono, SOekanto. 2010. *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prastowo, A.2012. *Metode Penelitian Kulaitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Weber, Max. 2008. *Sosiologi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Wibowo, Setyo, 2010: *Kepublikan dan Keprivatan dalam Polis Yunanai Kuno*.
Yogyakarta: Kanisius.